



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i4.139>

Vol. 3 No. 4 (2024)
pp. 253-265

Research Article

Implementasi Hubbard Act Dalam Kebijakan Sole Survivor Militer Amerika Serikat

Vanesha Salsabila Keisya

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia; vaneshasalsabila2004@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 17, 2024
Accepted : October 27, 2024

Revised : October 13, 2024
Available online : November 08, 2024

How to Cite: Vanesha Salsabila Keisya. (2024). Implementation of Hubbard ACT in the United States Military Sole Survivor Policy. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(4), 253-265.
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i4.139>

Implementation of Hubbard ACT in the United States Military Sole Survivor Policy

Abstract. This article discusses the influence of the Sole Survivor Policy on US military policy. Under the “Sole Survivor Policy” of the United States Department of Defense, service members who lose all their family members in war cannot be reassigned to a combat zone and will be ‘honorably discharged’ from the military. It aims to protect “the last son to carry the family name”. This research focuses on the case of the Hubbard brothers who became the forerunner of the Hubbard Act, which was passed by President George W Bush on August 29, 2008. This policy also resulted in veterans who were honorably discharged before the end of their contract not receiving adequate benefits. This has certainly harmed the fundamental rights of war veterans who have fought for their country, but are not given the rights they deserve. The method used in this research is normative juridical research method. The data used is secondary data. The data is presented qualitatively and analyzed descriptively. The result of this research is that the Hubbard Act, which is outlined in a United States public document entitled PUBLIC LAW 110-317, closes the gap in the existing “Sole Survivor” policy by

providing veterans with a number of benefits that have been offered to other honorably discharged military members.

Keywords: Hubbard Act, Sole Survivor Policy, Military Services.

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai pengaruh *Sole Survivor Policy* terhadap kebijakan militer Amerika Serikat. Di bawah kebijakan "*Sole Survivor Policy*" dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, anggota militer yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam perang tidak dapat ditugaskan kembali ke zona tempur dan akan diberhentikan 'secara hormat' dari militer. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi "*the last son to carry the family name*". Penelitian ini berfokus pada kasus Hubbard bersaudara yang menjadi cikal bakal lahirnya *Hubbard Act*, yang di sahkan oleh Presiden George W Bush pada tanggal 29 Agustus 2008 lalu. Kebijakan ini juga menyebabkan para veteran yang diberhentikan dengan hormat, sebelum akhir kontrak tidak mendapatkan sejumlah tunjangan yang memadai. Hal tersebut tentunya sudah mencederai hak-hak fundamental para veteran perang yang sudah berjuang demi negaranya, namun tidak diberikan hak yang semestinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah *Hubbard Act* yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen publik Amerika Serikat berjudul *PUBLIC LAW 110-317*, menutup celah dalam kebijakan "*Sole Survivor*" yang ada dengan memberikan para veteran tersebut sejumlah tunjangan yang telah ditawarkan kepada anggota militer lain yang diberhentikan dengan hormat.

Kata Kunci: Hubbard Act, Kebijakan Sole Survivor, Layanan Militer.

PENDAHULUAN

Dalam buku Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.¹ Perang pertama yang tercatat dalam sejarah terjadi sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, seperti dalam teks-teks Mesopotamia. Sejak saat itu, hampir setiap peradaban telah terlibat dalam konflik militer. Beberapa contoh terkenal termasuk Perang Dunia I dan II pada abad ke-20, tetapi sebelum itu, terdapat banyak perang, seperti Perang Seratus Tahun antara Inggris dan Prancis (1337-1453) dan konflik-konflik di antara berbagai kerajaan dan kekaisaran di seluruh dunia.² Peperangan meskipun dibenci, tampaknya menjadi hiasan perjalanan sejarah manusia dimuka bumi. Sejak masa kuno hingga modern, kenyataan membuktikan bahwa peperangan selalu digunakan sebagai alat solusi antar kelompok manusia. Namun, upaya untuk menghapus perang belum pernah membuahkan hasil, dan pertikaian bersenjata masih tetap ada. Oleh sebab itu hukum perang tidak mengatur tentang larangan perang tetapi perlindungan terhadap korban perang.³

¹ Mochtar Kusumaatmadja. (1998). *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Bandung. Bina Cipta Publishing, p.10

² Allmand, Christopher T. (1988). *The Hundred Years War*. Cambridge, UK. Cambridge University Press, p. 7

³ Kushartoyo BS,, S.H., M.H. (ed). (2007). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Perang sejak dahulu selalu memakan banyak korban, siapapun bisa terlibat dalam peperangan dan siapapun bisa kehilangan akibat terjadinya perang. Bagi keluarga mana pun, kehilangan saudara kandung, anak, atau kerabat selama perang sangatlah menghancurkan. Termasuk bagi Thomas dan Alleta Sullivan, seluruh hidup mereka berubah ketika kelima anak laki-laki mereka meninggal pada hari yang sama di atas kapal yang sama - kehilangan terbesar bagi satu keluarga dalam sejarah perang. Kematian Sullivan bersaudara mengguncang Amerika Serikat dan merupakan awal mula lahirnya sejumlah kebijakan baru di militer Amerika Serikat mengenai "Sole Survivor Policy" diantaranya, *Bureau of Naval Personnel Information Bulletin, 1942; Extract on the assignment of brothers to same ship or station, Directive 1315.15 "Special Separation Policies for Survivorship"* tahun 1988 namun kembali berlaku tahun 2017,⁴ dan *Hubbard Act 2008*. Isu yang memunculkan peraturan-peraturan tersebut pertama kali menarik perhatian publik setelah insiden kelima Sullivan Brothers.

Di bawah kebijakan "Sole Survivor Policy" dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, anggota militer yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam perang tidak dapat ditugaskan kembali ke zona tempur dan akan diberhentikan 'secara hormat' dari militer atau dapat mengajukan pensiun dini. Kebijakan ini dirancang selama Perang Dunia II setelah kisah melegenda ke-lima Sullivan Bersaudara, pelaut yang bertugas di kapal penjelajah yang sama, tewas saat kapal mereka tenggelam selama pertempuran Guadalcanal pada tahun 1942. "Sole Survivor Policy" menyatakan bahwa jika hanya satu anggota keluarga yang masih hidup, mereka harus dilindungi dan segera dijauhi dari tugas militer. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi keluarga lain agar tidak kehilangan semua anak mereka dalam perang, atau dalam kata lain guna melindungi "the last son to carry the family name" dan meminimalisir duka yang dirasakan.

Hubbard Act, yang di sahkan oleh Presiden George W Bush pada tanggal 29 Agustus 2008 lalu di Gedung Putih, setelah insiden Jason Hubbard dari Clovis, California, pada tahun 2004 dan 2007 dimana dua saudara lakinya, Jared dan Nathan Hubbard tewas dalam perang Irak. Kebijakan *Sole Survivor* yang sudah ketinggalan zaman ini juga menyebabkan semacam *Catch-22*⁵ dalam situasi tertentu. Para veteran yang diberhentikan dengan hormat sebagai "Sole Survivor" sebelum akhir kontrak mereka tidak mendapatkan tunjangan yang signifikan. Buktinya, Jason kehilangan asuransi kesehatan dan tunjangan veteran lainnya karena keluar sebelum

⁴ Directive 1315.15 "Special Separation Policies for Survivorship" Menjelaskan seperangkat peraturan dalam militer Amerika Serikat, yang sebagian ditetapkan oleh hukum, yang dirancang untuk melindungi anggota keluarga dari wajib militer selama masa damai, atau dari tugas yang berbahaya atau keadaan lain, jika mereka telah kehilangan anggota keluarga karena dinas militer. Terbitan Lembaga Departement of Defense, United States of America. (2017). available from: <https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodi/131515p.pdf>, [Accessed 4 Oktober 2024].

⁵ Situasi paradoksal yang tidak dapat dihindari oleh seseorang karena adanya peraturan atau batasan yang bertentangan. *Catch-22* sering kali terjadi akibat aturan, regulasi, atau prosedur yang tunduk pada seseorang, tetapi tidak dapat dikontrol, karena melawan aturan tersebut berarti menerimanya. Meriam Webster E-Dictionary. Available from: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/catch-22>. [Accessed 4 Oktober 2024].

masa kontraknya habis. Angkatan Darat memberi Hubbard pemberhentian dengan hormat enam bulan lebih cepat dari kontraknya selama tiga tahun. Namun ketika dia kembali ke California, Hubbard mendapati bahwa asuransi kesehatannya, yang juga menanggung istri dan putranya yang sedang hamil, telah dipotong dan aksesnya terhadap tunjangan veteran lainnya ditolak karena dia telah meninggalkan militer lebih awal.

Dengan adanya *Hubbard Act* diharapkan menjadi upaya legislatif dari former presiden Amerika Serikat, George W Bush, untuk menangani situasi tidak menguntungkan, dengan cara berupa Dukungan Psikologis dan Keuangan bagi para veteran perang maupun former member yang sebelumnya pernah bergabung ke militer. Peraturan ini juga bagian dari sebuah upaya dan implementasi bantuan perlindungan warga negara, terlebih bagian dari anggota keluarga, yang turut serta menjadi bagian dari militer. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana penerapan *Hubbard Act* dalam Kebijakan Militer “*Sole Survivor*” Amerika Serikat setelah insiden Hubbard Bersaudara pada tahun 2004 dan tahun 2007 dalam perang Irak? dan Bagaimana Kebijakan “*Sole Survivor*” dalam Menjamin Perlindungan Hak-Hak Dasar (*Fundamental Rights*) Angkatan Bersenjata?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jika merujuk pada rumusan masalah yang ada dan untuk menjawab permasalahan tersebut, spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan adalah hukum normatif (*Normative Law Research*), Pendekatan penelitian hukum doctrinal yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu PUBLIC LAW 110-317 tentang Hubbard Act, dengan menganalisa kasus Jason Hubbard setelah gugurnya kedua saudara laki-lakinya selama perang Irak pada tahun 2004 dan 2007, yang menjadi titik awal perumusan Hubbard Act. Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan penulis ialah sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer yaitu PUBLIC LAW 110-317 tentang Hubbard Act, dan bahan hukum sekunder Hasil-hasil penelitian, Pendapat para pakar hukum, Buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum. Data yang telah terkumpul disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan kerangka regulasi berupa peraturan-peraturan atau norma-norma yang terkait dengan beberapa permasalahan yang diteliti sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Hubbard Act* dalam Kebijakan Militer “*Sole Survivor*” Amerika Serikat Setelah Insiden Hubbard Bersaudara pada tahun 2004 dan tahun 2007 dalam Perang Irak.

Kematian, duka, dan kehilangan selalu menjadi bagian dari Kehidupan militer. Sejak Revolusi Amerika, lebih dari 1.208.000 pria dan wanita telah gugur dalam pelayanan kepada negara Amerika.⁶ Kematian mendadak akibat perang merupakan

⁶ National Center for Veterans Analysis and Statistics. (2019). *On memorial day VA honors all those who have served and died* [Infographic]. Available from:

risiko bagi mereka yang bertugas di medan perang dan dapat menimbulkan dampak tersendiri bagi anggota keluarga militer yang masih hidup.⁷ Salah satunya, selain trauma dan kesedihan yang dirasakan, juga berupa hilangnya dukungan kesehatan dan beberapa tunjangan lainnya yang menyokong para keluarga veteran perang. Termasuk bagi keluarga Hubbard setelah kedua anak laki-laki di keluarga tersebut tewas dalam pertempuran Irak dan menyisakan “*The Only Surviving Son*” atau “*The Last Son Comes Home*” setelah dibebastugaskan dan kehilangan seluruh tunjangan militernya.

The Sole Survivor Policy yang tercantum di dalam dokumen Petunjuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat 1315.15 tentang “*Special Separation Policies for Survivorship*” menjelaskan seperangkat peraturan dalam militer Amerika Serikat, yang sebagian ditetapkan oleh hukum, yang dirancang untuk melindungi anggota keluarga dari wajib militer selama masa damai, atau dari tugas yang berbahaya atau keadaan lain, jika mereka telah kehilangan anggota keluarga karena dinas militer. Sejauh ini, belum ada penelitian yang benar-benar membahas lebih dalam mengenai permasalahan ini. Banyak sumber beredar di internet yang salah satunya membahas hubungan antara rasa sedih dan duka akibat kematian anggota keluarga di medan perang yang berdampak pada komunitas militer di masa damai maupun perang.⁸

Tahun 2007 kala itu merupakan tahun yang berat bagi Jason hubbard selepas gugurnya salah satu adik laki-laknya Jared Hubbard pada tahun 2004 akibat ranjau yang diletakkan di pinggir jalan di Ramadi pada pertempuran Irak. Tiga tahun kemudian disusul kematian adik bungsunya Nathan Hubbard pada tahun 2007 setelah mengalami kecelakaan helikopter Black Hawk yang membawa Nathan yang berusia 21 tahun jatuh dalam sebuah misi malam hari di provinsi Al Tamim, Irak, dan menewaskan semua orang di dalamnya.⁹ Insiden tersebut kembali mengingatkan Amerika kepada peristiwa-peristiwa kelam lainnya, baik sebelum dan sesudah kisah melegenda kelima Sullivan Bersaudara pada tahun 1942, dalam waktu Perang Dunia ke-2 yang menjadi *The founding Father* Kebijakan “*Sole Survivor*” Militer Amerika Serikat dan resmi diimplementasikan pada tahun 1948.¹⁰ Hal ini diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 6 huruf (o) Undang-Undang Wajib Militer tahun 1948 (*The Military Selective Service Act of 1948*) mengecualikan satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup dari sebuah keluarga di mana satu atau lebih anak laki-laki atau perempuan telah terbunuh atau meninggal dalam tugas, atau kemudian meninggal

https://www.va.gov/vetdata/docs/Demographics/mem_day_20190524_F.pdf. [Accessed 6 Oktober 2024].

⁷ Gill McGill. (2023). "Bereaved Military Families: Relationships and Identity." JOURNAL OF LOSS AND TRAUMA, Routledge: Taylor & Francis Group, 28(6), 504–521

⁸ Catherine Hitch. (2023). "Enablers and barriers to military veterans seeking help for mental health and alcohol difficulties: A systematic review of the quantitative evidence". Sage Journals: Journal of Health Services Research & Policy, 28(3):197-211

⁹ NBC News. (2008). Surviving son denied health benefits post-Iraq. <https://www.nbcnews.com/id/wbna24162310>. [Accessed 6 Oktober 2024].

¹⁰ Scott Baron, (2019), *Valor of many stripes : remarkable Americans in World War II*, North Carolina, McFarland & Company, Inc, p. 64

karena cedera atau penyakit yang terjadi saat bertugas di militer, dari wajib militer, baik di masa damai maupun di masa perang.¹¹

Sebelum *Sole Survivor Policy* secara resmi diterapkan pada tahun 1948, beberapa kejadian yang terjadi ketika seorang anggota militer yang selamat dibebaskan dari dinas aktif.

1. Pada Perang Dunia II, empat bersaudara dari keluarga Borgstrom, Elmer, Clyde, serta si kembar Rolon dan Rulon, terbunuh dalam waktu beberapa bulan satu sama lain pada tahun 1944. Orang tua mereka kemudian berhasil mengajukan petisi agar putra kelima mereka, Boyd, yang juga sedang bertugas aktif, dibebaskan dari dinas. Putra keenam mereka, Elton, yang belum mencapai usia wajib militer, dibebaskan dari dinas militer.¹²
2. Tiga bersaudara Butehorn dari Bethpage, New York, Charles, Joseph, dan Henry, semuanya dikerahkan selama Perang Dunia II. Setelah Charles terbunuh dalam tugas di Prancis pada November 1944 dan Joseph terbunuh dalam tugas di Pasifik pada Mei 1945, Henry, yang bertugas di Angkatan Udara Angkatan Darat di Italia, diperintahkan pulang oleh Departemen Perang.
3. Tiga Wise bersaudara, Jeremy, Ben, dan Beau Wise bertugas dalam pertempuran aktif dalam Perang Afghanistan. Jeremy, mantan Navy SEAL, berada di pangkalan CIA sebagai kontraktor militer dan terbunuh pada tahun 2009 ketika seorang pembom bunuh diri menyerang pangkalan tersebut. Kemudian pada tahun 2012, Ben, seorang petugas medis Pasukan Khusus Angkatan Darat, terluka parah di Afghanistan dan meninggal dunia akibat lukanya enam hari kemudian di Landstuhl Regional Medical Center. Beau dikerahkan di Afghanistan bersama

¹¹ Pada tahun 1971, selama Perang Vietnam, Kongres mengubah Pasal 6 huruf (o) Undang-Undang Wajib Militer tahun 1948 untuk menghapus larangan bagi anak laki-laki yang masih hidup untuk mengikuti wajib militer selama masa perang atau keadaan darurat nasional yang dinyatakan oleh Kongres. (*Public Law 80-759, 80th Congress, June 24, 1948*)

Setiap anak laki-laki, tidak hanya anak laki-laki yang masih hidup, dibebaskan dari wajib militer di masa damai jika ayah, saudara laki-laki, atau saudara perempuan mereka telah terbunuh atau meninggal dalam tugas sebelum 31 Desember 1959, atau meninggal setelah tanggal tersebut sebagai akibat dari cedera atau penyakit yang terjadi saat bertugas. Anak laki-laki juga dibebaskan dari wajib militer di masa damai jika ayah, saudara laki-laki, atau saudara perempuannya berstatus sebagai tawanan perang atau hilang dalam tugas. Namun, satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup diizinkan untuk mengajukan permohonan masuk militer secara sukarela. Amandemen tersebut juga menetapkan bahwa seorang anak laki-laki yang telah direkrut dan tidak secara sukarela memperpanjang masa tugasnya atau mendaftar kembali, dan selama masa tugasnya berada di bawah kriteria Pasal 6(o) yang akan melarang mereka untuk dilantik sebagai warga sipil, diizinkan untuk mengajukan permohonan pemecatan segera dari angkatan bersenjata. Bagi yang menjalani proses pengadilan militer tidak diizinkan untuk mengajukan permohonan pemecatan sampai proses tersebut selesai atau hukuman yang dijatuhkan telah dijalani. (*Public Law 92-129, 92nd Congress, September 28, 1971*)

¹² An Official Website Of The State Of Utah. (1995). World War II Claimed the Lives of Four Utah Brother. Available From: <https://historytogo.utah.gov/four-utah-brothers/>. [Accessed 6 Oktober 2024].

Marinir pada saat itu dan segera dibebastugaskan dari tugas dan kembali ke Amerika Serikat.¹³

Sebagai “*The Last Surviving Hubbard Son*”, Angkatan Darat memberhentikan Hubbard dengan hormat enam bulan lebih cepat dari kontraknya selama tiga tahun di bawah kebijakan “*Sole Survivor*” dari Departemen Pertahanan. Namun ketika kembali ke California, Hubbard mendapati bahwa asuransi kesehatannya, yang juga menanggung putranya dan istrinya yang sedang hamil, telah dipotong dan aksesnya terhadap tunjangan veteran lainnya ditolak karena telah meninggalkan militer lebih awal. Hubbard juga kehilangan akses ke program pinjaman rumah bagi veteran dan hibah sekolah di bawah GI Bill,¹⁴ dan diminta untuk membayar kembali bonus pendaftarannya. Kemudian Hubbard menghubungi Rep. Devin Nunes, seorang pengusaha dan politisi Amerika untuk menulis Rancangan Undang-Undang (RUU) Bipartisan (*The Bipartisan Bill*) bersama politis-politisi Amerika lainnya, guna memperjuangkan para veteran lain yang mungkin menghadapi situasi yang sama. Bersama sama melalui RUU tersebut mereka mulai bekerja pada “*The Hubbard Act*”.¹⁵

Kemudian RUU bipartisan lolos di Senat dengan suara bulat pada bulan Agustus 2008 lalu, penantian Hubbard akhirnya menemukan titik terang, dalam sebuah upacara di sebuah ruang khusus milik Presiden George W Bush, Jason beserta keluarganya di undang ke White House. Presiden menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang dengan total keseluruhan 10 pasal—yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah dokumen publik Amerika Serikat yang kita kenal dengan PUBLIC LAW 110-317 tentang *The Hubbard Act*, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2008. Undang-undang ini menutup celah dalam kebijakan “*Sole Survivor Policy*” yang ada dengan memberikan para veteran tersebut sejumlah tunjangan yang telah ditawarkan kepada anggota militer lain yang diberhentikan dengan hormat. Undang-undang tersebut pada Pasal 2 tentang “*Continued Payment of Bonus and Similar Benefits for Members of The Armed Forces Who Receive Sole Survivorship Discharge*” mengatakan, veteran militer *Sole Survivor* tidak akan diharuskan membayar kembali sebagian dari bonus pendaftaran mereka dan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan GI Bill untuk pendidikan dan cakupan perawatan kesehatan. “*(i) shall not require repayment by the member of the unearned portion of any bonus, incentive pay, or similar benefit previously paid to the member*”.

Lebih lanjut, isi *Preamble Hubbard Act* menyatakan bahwa:

¹³ The Washington Post. (2014). ONE FAMILY, TWO SACRIFICES – In a war few Americans fought, the Wisers would pay an awful price. Available From: <https://www.washingtonpost.com/sf/local/2014/01/18/one-family-two-sacrifices/>. [Accessed 6 Oktober 2024].

¹⁴ GI Bill adalah program tunjangan pendidikan militer yang dioperasikan oleh Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat. Program ini dapat digunakan oleh anggota militer yang memenuhi syarat dan dapat dialihkan kepada pasangan dan anak usia kuliah dari anggota militer tersebut. Lihat Zhang, L. (2020). "Evaluating the Impact of the Post-9/11 GI Bill on College Enrollment for Veterans with Service-Connected Disabilities." Sage Journals: Teachers College Record, 122(3), 1-44

¹⁵ The Seattle Times. Law restores “sole survivor” veteran benefits. Available from: <https://www.seattletimes.com/nation-world/law-restores-sole-survivor-veteran-benefits/>. [Accessed 6 Oktober 2024]

An Act

To ensure the fair treatment of a member of the Armed Forces who is discharged from the Armed Forces, at the request of the member, pursuant to the Department of Defense policy permitting the early discharge of a member who is the only surviving child in a family in which the father or mother, or one or more siblings, served in the Armed Forces and, because of hazards incident to such service, was killed, died as a result of wounds, accident, or disease, is in a captured or missing in action status, or is permanently disabled, to amend the Internal Revenue Code of 1986 to repeal the dollar limitation on contributions to funeral trusts, and for other purposes.¹⁶

Keseluruhan *Hubbard Act* mengatur:

1. Continued payment of bonuses and similar benefits for members of the armed forces who receive sole survivorship discharge. (section 2)
2. Availability of separation pay for members of the armed forces with less than six years of active service who receive sole survivorship discharge. (section 3)
3. Transitional health care for members of the armed forces who receive sole survivorship discharge (section 4)
4. Transitional commissary and exchange benefits for members of the armed forces who receive sole survivorship discharge (section 5)
5. Veterans benefits for members of the armed forces who receive sole survivorship discharge. (section 6)
6. Unemployment compensation for members of the armed forces who receive sole survivorship discharge. (section 7)
7. Preference-eligible status for members of the armed forces who receive sole survivorship discharge (section 8)
8. Repeal of dollar limitation on contributions to funeral trusts (section 9)
9. Effective dates. (section 10)¹⁷

Hubbard Act memberikan amandemen terhadap kategori kelayakan untuk tujuan pemberian tunjangan bagi para veteran dengan menambahkan sub-ayat (H) pada judul 5, Kode Amerika Serikat (U.S.C.) bagian 2108(3). Amandemen ini memberikan kategori baru yang memenuhi syarat untuk keperluan preferensi yang mencakup veteran yang diberhentikan atau dibebaskan dari masa dinas aktif angkatan bersenjata dengan alasan hanya bertahan hidup. Undang-undang ini berlaku sehubungan dengan pemberhentian atau pembebasan dari angkatan bersenjata yang diberikan setelah tanggal 29 Agustus 2008. Pasal 10(c) Undang-Undang mendefinisikan "*Honorable Discharge As The Sole Survivor*" sebagai pemisahan anggota dari angkatan bersenjata, atas permintaan anggota tersebut, sesuai dengan kebijakan Departemen Pertahanan yang mengizinkan pemisahan awal anggota yang merupakan satu-satunya anak yang masih hidup dalam sebuah keluarga yang ayah atau ibunya atau satu atau lebih saudara kandungnya:

- (1) berdinis di angkatan bersenjata;

¹⁶ PUBLIC LAW 110-317 tentang The Hubbard Act (2008)

¹⁷ Ibid

- (2) terbunuh, meninggal akibat luka, kecelakaan, atau penyakit, berada dalam status tertangkap atau hilang dalam tugas, atau cacat permanen 100 persen atau dirawat di rumah sakit secara terus menerus (dan tidak dipekerjakan secara layak karena kecacatan atau rawat inap tersebut); dan
- (3) kematian, status, atau kecacatan tidak diakibatkan oleh pelanggaran yang disengaja atau pengabaian yang disengaja oleh orang tua atau saudara kandungnya dan tidak terjadi selama periode ketidakhadiran yang tidak resmi.¹⁸

Dari kasus inilah pertama kalinya kongres dan presiden mengakui kebijakan *Sole Survivor* dan kemudian memasukkannya ke dalam undang-undang sehingga siapa pun yang berada dalam situasi yang sama seperti Jason dan keluarga Hubbard tidak perlu melakukan apa yang sudah mereka lalui untuk mendapatkan tunjangan yang seharusnya menjadi hak mereka. Departemen Pertahanan memperkirakan ada 55 orang yang teridentifikasi selamat sebagai "*Sole Survivor*" dan Jason Hubbard merupakan salah satunya, terhitung sejak serangan teroris 11 September 2001 (insiden 9/11). Dengan adanya *Hubbard Act* diharapkan menjadi upaya legislatif dari former presiden Amerika Serikat, George W Bush, untuk menangani situasi tidak menguntungkan, dengan cara berupa Dukungan Psikologis dan Keuangan bagi para veteran perang maupun former member yang sebelumnya pernah bergabung ke militer. Peraturan ini juga bagian dari sebuah upaya dan implementasi bantuan perlindungan warga negara, terlebih bagian dari anggota keluarga, yang turut serta menjadi bagian dari militer.

Kebijakan "*Sole Survivor*" dalam Menjamin Perlindungan Hak-Hak Dasar (*Fundamental Rights*) Angkatan Bersenjata.

Kebijakan *Sole Survivor* biasanya merujuk pada peraturan yang memberikan perlindungan kepada anggota keluarga yang selamat dari suatu insiden, seperti konflik militer, di mana anggota keluarga lainnya tewas. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut mencakup aspek-aspek seperti perlindungan emosional, dukungan finansial, dan akses ke layanan kesehatan. Meskipun kebijakan ini tidak secara langsung membahas hak fundamental seseorang, namun ada implikasi yang relevan. Hak untuk hidup, perlindungan dari diskriminasi, dan hak atas kesejahteraan mental dan emosional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun Kebijakan *Sole Survivor* lebih fokus pada perlindungan individu yang selamat, hal ini juga terkait dengan pengakuan terhadap hak-hak dasar dan martabat setiap individu. Terutama dalam konteks tugas militer dan penghindaran dari penugasan berbahaya.

Perlindungan terhadap hak fundamental bagi personil angkatan bersenjata sudah termaktub dengan jelas di dalam "*Handbook on Human Rights of Armed Forces Personnel and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel*" yang di keluarkan oleh Kantor untuk Lembaga-lembaga Demokratis dan Hak-hak Asasi

¹⁸ Ibid

Manusia atau *Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR).¹⁹ Dalam buku panduan ini, hak-hak asasi manusia dikelompokkan ke dalam empat kelompok:

- 1) hak-hak sipil dan politik;
- 2) hak-hak yang berhubungan dengan kesempatan yang sama dan non-diskriminasi dalam angkatan bersenjata;
- 3) hak-hak yang berhubungan dengan kehidupan militer; dan
- 4) hak-hak prosedural yang berkaitan dengan pelaksanaan dan jaminan hak asasi manusia di barak.²⁰

Titik awal untuk pendekatan dalam buku pedoman ini adalah Kode Etik OSCE tentang Aspek-aspek Politik-Militer Keamanan (*Code of Conduct on Politico Military Aspects of Security*). Kode Etik ini mengacu pada hak-hak personil angkatan bersenjata dalam beberapa kesempatan. Salah satu bagian terpentingnya terdapat pada paragraf 32, yang menyatakan: “*Each participating State will ensure that military, paramilitary and security forces personnel will be able to enjoy and exercise their human rights and fundamental freedoms as reflected in OSCE documents and international law, in conformity with relevant constitutional and legal provisions and with the requirements of service.*” Paragraf ini menggarisbawahi gagasan bahwa anggota angkatan bersenjata (personil militer, paramiliter, dan pasukan keamanan) akan dapat menikmati dan melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental mereka sebagaimana tercermin dalam dokumen-dokumen OSCE dan hukum internasional, sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional dan hukum yang relevan dan dengan persyaratan dinas.²¹

Salah satu sumber panduan yang berharga adalah yurisprudensi di bawah Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tahun 1950 (*the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950*). Seperti Kode Etik OSCE, Konvensi ini, sebagaimana ditafsirkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, memperlakukan anggota angkatan bersenjata sebagai “*citizen in uniform*” atau warga negara berseragam, yaitu, personel dinas tetap memiliki hak-hak sipil dan politik mereka, meskipun hak-hak itu dimodifikasi sesuai dengan konteks militer. Pendekatan “*citizen in uniform*” menyiratkan bahwa personil angkatan bersenjata, baik yang profesional maupun wajib militer, berhak atas hak dan perlindungan yang sama dengan orang lain, dengan tunduk pada batasan-batasan tertentu yang diberlakukan oleh kehidupan militer. Memang, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang, termasuk personel angkatan bersenjata, adalah bagian dari konsep keamanan komprehensif OSCE, yang mengaitkan pemeliharaan perdamaian dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan

¹⁹ The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). (2008). Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel. Available From: <https://www.osce.org/files/f/documents/o/c/31393.pdf>. [Accessed 7 Oktober 2024].

²⁰ Ibid

²¹ Victor-Yves Ghébal dan Alexander Lambert. (2005). The OSCE Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security: Anatomy and Implementation. Leiden/Boston: Brill Academic Publishers, p. 145

fundamental.

Pentingnya Memastikan Hak Asasi Manusia dalam Angkatan Bersenjata

- 1) Dengan menjadi warga negara, anggota angkatan bersenjata harus menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang sama dengan warga negara lain.
- 2) Penghormatan pada hak-hak asasi anggota angkatan bersenjata memberi sumbangan pada suatu militer yang terintegrasi dengan kuat dalam masyarakat.
- 3) Penghormatan pada hak-hak asasi manusia di barak (*batalyon*) mencegah militer disalahgunakan oleh pemerintah dan berbalik melawan penduduk sipil.
- 4) Penghormatan terhadap hak asasi manusia di barak melindungi anggota angkatan bersenjata dari penyalahgunaan dan penindasan oleh pemerintah atau komandan militer.
- 5) Operasi pemeliharaan perdamaian modern mengharuskan personel angkatan bersenjata untuk mengintegrasikan pekerjaan hak asasi manusia ke dalam operasi mereka sehari-hari. Mereka akan lebih siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu jika mereka sendiri beroperasi di lingkungan yang menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, dan mengharuskan mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai yang mendasarinya.²²

Berdasarkan uraian diatas, Kebijakan Sole Survivor memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar bagi anggota personil Angkatan Bersenjata yang merupakan satu-satunya yang selamat dalam keluarga mereka. Dengan memberikan perlindungan dari penugasan berbahaya dan mengakui pengorbanan anggota keluarga yang telah meninggal, kebijakan ini tidak hanya melindungi individu tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

- 1) Kebijakan ini melindungi hak individu untuk hidup aman dan bebas dari ancaman, dengan memastikan bahwa mereka tidak dipaksa untuk terlibat dalam situasi berbahaya yang dapat mengancam nyawa mereka
- 2) Kebijakan ini menjamin bahwa *sole survivor* diperlakukan secara adil dan setara dalam konteks *Military Service*. Mereka tidak akan didiskriminasi karena status mereka sebagai satu-satunya anggota keluarga yang tersisa
- 3) Selain perlindungan fisik, kebijakan ini juga mencakup dukungan psikologis bagi *sole survivor*, membantu mereka beradaptasi dengan kehilangan dan menjalani kehidupan setelah kehilangan anggota keluarga

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai Implementasi Hubbard Act dalam kebijakan *Sole Survivor* Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tragedi Sullivan Bersaudara pada perang dunia ke-II, yang memberikan perlindungan bagi anggota keluarga yang selamat dari penugasan militer berbahaya. Kebijakan ini juga diatur dalam Pasal 6 huruf (o) Undang-Undang Wajib Militer tahun 1948, yang mengecualikan "*The Only Surviving Son*" atau "*The Last Son Comes Home*" dari wajib militer. Berkaca pada kasus Hubbard Bersaudara pada tahun 2007 yang menyisahkan Jason Hubbard sebagai "*The Last*

²² The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) Op.Cit.

Surviving Hubbard Son" setelah kehilangan dua saudaranya waktu perang Irak, kemudian dibebastugaskan dan kehilangan seluruh tunjangan militernya. Ini menjadi titik awal dimana Hubbard dan sejumlah politisi Amerika mulai merancang RUU Bipartisan yang kemudian akan menjadi Undang-undang Hubbard, yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen publik Amerika Serikat yang kita kenal dengan PUBLIC LAW 110-317 tentang *The Hubbard Act*, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2008 lalu. Undang-undang ini menutup celah dalam kebijakan "*Sole Survivor*" yang ada dengan memberikan para veteran tersebut sejumlah tunjangan yang telah ditawarkan kepada anggota militer lain yang diberhentikan dengan hormat. Peraturan ini juga bagian dari sebuah upaya dan implementasi bantuan perlindungan warga negara, terlebih bagian dari anggota keluarga, yang turut serta menjadi bagian dari militer.

Kebijakan *Sole Survivor* tidak secara langsung membahas hak fundamental seseorang, namun ada implikasi yang relevan. Perlindungan terhadap hak fundamental bagi personil angkatan bersenjata sudah termaktub dengan jelas di dalam "*Handbook on Human Rights of Armed Forces Personnel and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel*" yang di keluarkan oleh Kantor untuk Lembaga-lembaga Demokratis dan Hak-hak Asasi Manusia atau *Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR). Anggota angkatan bersenjata (personil militer, paramiliter, dan pasukan keamanan) akan dapat menikmati dan melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental mereka sebagaimana tercermin dalam dokumen-dokumen OSCE dan hukum internasional, sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional dan hukum yang relevan dan dengan persyaratan dinas. Kebijakan *Sole Survivor* memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar bagi anggota personil Angkatan Bersenjata yang merupakan satu-satunya yang selamat dalam keluarga mereka. Dengan memberikan perlindungan dari penugasan berbahaya dan mengakui pengorbanan anggota keluarga yang telah meninggal, kebijakan ini tidak hanya melindungi individu tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allmand, Christopher T. (1988). *The Hundred Years War*. Cambridge, UK. Cambridge University Press.
- Catherine Hitch. (2023). "Enablers and barriers to military veterans seeking help for mental health and alcohol difficulties: A systematic review of the quantitative evidence". *Sage Journals: Journal of Health Services Research & Policy*, 28(3):197-211.
- Gill McGill. (2023). "Bereaved Military Families: Relationships and Identity." *JOURNAL OF LOSS AND TRAUMA*, Routledge: Taylor & Francis Group, 28(6), 504-521.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1998). *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Bandung. Bina Cipta Publishing.
- Kushartoyo BS., S.H., M.H. (ed). (2007). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

- Scott Baron, (2019), *Valor of many stripes : remarkable Americans in World War II*, North Carolina, McFarland & Company, Inc.
- Victor-Yves Ghébali dan Alexander Lambert. (2005). *The OSCE Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security: Anatomy and Implementation*. Leiden/Boston: Brill Academic Publishers.
- Zhang, L. (2020). "Evaluating the Impact of the Post-9/11 GI Bill on College Enrollment for Veterans with Service-Connected Disabilities." *Sage Journals: Teachers College Record*, 122(3), 1-44.

WEBSITE

- Terbitan Lembaga Departement of Defense, United States of America. (2017). available from: <https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodi/131515p.pdf>, [Accessed 4 Oktober 2024].
- Meriam Webster E-Dictionary. Available from: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/catch-22>. [Accessed 4 Oktober 2024].
- National Center for Veterans Analysis and Statistics. (2019). On memorial day VA honors all those who have served and died [Infographic]. Available from: https://www.va.gov/vetdata/docs/Demographics/mem_day_20190524_F.pdf. [Accessed 6 Oktober 2024].
- NBC News. (2008). Surviving son denied health benefits post-Iraq. <https://www.nbcnews.com/id/wbna24162310>. [Accessed 6 Oktober 2024].
- An Official Website Of The State Of Utah. (1995). World War II Claimed the Lives of Four Utah Brother. Available From: <https://historytogo.utah.gov/four-utah-brothers/>. [Accessed 6 Oktober 2024]
- The Washington Post. (2014). ONE FAMILY, TWO SACRIFICES – In a war few Americans fought, the Wisers would pay an awful price. Available From: <https://www.washingtonpost.com/sf/local/2014/01/18/one-family-two-sacrifices/>. [Accessed 6 Oktober 2024].
- The Seattle Times. Law restores “sole survivor” veteran benefits. Available from: <https://www.seattletimes.com/nation-world/law-restores-sole-survivor-veteran-benefits/>. [Accessed 6 Oktober 2024]
- The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). (2008). *Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel*. Available From: <https://www.osce.org/files/f/documents/o/c/31393.pdf>. [Accessed 7 Oktober 2024].